

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

3.1.1 Permasalahan Internal

Beberapa permasalahan internal yang dapat mempengaruhi penyelenggaraan tugas dan fungsi pelayanan pada kantor Kecamatan Rakumpit antara lain :

a. Seksi Pemerintahan

Dengan banyaknya permintaan masyarakat untuk pelayanan pembuatan Surat Pernyataan Tanah (SPT), maka seksi pemerintahan sesuai tugas pokok dan fungsinya mendapati permasalahan sebagai berikut :

- Kurangnya tenaga juru ukur di lapangan;
- Terbatasnya sarana kendaraan roda dua untuk petugas lapangan;
- Kurangnya peralatan untuk menunjang pekerjaan pengukuran di lapangan berupa *Global Positioning Satelite (GPS)*.

b. Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat

- Kurangnya tenaga sebagai petugas di lapangan di dalam pembuatan profil Kecamatan Rakumpit sehingga tidak tersedianya data dan deskripsi kondisi Kecamatan sesuai dengan keadaan di masyarakat

yang di dukung dengan data yang lebih akurat dan lengkap;

- Perlunya peningkatan kapasitas SDM sehingga akan meningkatkan profesionalisme dalam melaksanakan setiap pekerjaan yang dilakukan.

c. *Seksi Ketentraman dan Ketertiban*

- Kurangnya koordinasi staf, tenaga lapangan dan tenaga administrasi dalam melaksanakan tugas-tugas pokok dan fungsi pelayanann secara prima;
- Perlengkapan kantor yang tidak memadai sehingga menghambat kelancaran proses pelayanan administrasi.

d. *Seksi Kesejahteraan Sosial*

- Perlengkapan Kantor yang tidak memadai sehingga menghambat kelancaran proses pelayanan administrasi.

e. *Seksi Pelayanan Masyarakat*

- Kurangnya tenaga teknis komputer yang menguasai baik aplikasi atau program komputer (*software*) maupun perangkat keras (*hardware*) komputer;
- Kurangnya sosialisasi dalam pembuatan pengajuan Kartu Keluarga sehingga masyarakat tidak melampirkan kelengkapan domisili RT/RW setempat dan akibatnya banyak warga yang tidak jelas domisilinya.

Disamping hal-hal di atas masih ada permasalahan yang sering terjadi di internal Kecamatan Rakumpit dan hubungannya dengan masyarakat umum di antaranya :

- a. Belum tersedianya sumber daya aparatur dengan kemampuan teknis tertentu, antara lain : perencanaan, pengelola anggaran / pembukuan dan lain-lain sumber daya keprofesionalan;
- b. Masih lemahnya sebagian besar kualitas sumber daya aparatur pemerintahan Kelurahan;
- c. Dukungan anggaran yang belum memadai sehingga kegiatan yang terlaksana belum berjalan secara optimal;
- d. Masih lemahnya koordinasi pelaksanaan tugas antar seksi;
- e. Masih lemahnya partisipasi kalangan dunia usaha dalam penyelenggaraan pembangunan;
- f. Wilayah Kecamatan Rakumpit yang luas dan masih lemahnya anggaran Pemerintah Daerah dalam rangka pemenuhan kebutuhan infrastruktur masyarakat secara lebih memadai.

3.1.2 Permasalahan Eksternal

Permasalahan pembangunan daerah merupakan perkiraan kesenjangan antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan serta antara apa yang ingin dicapai dimasa datang dengan kondisi riil saat perencanaan dibuat. Potensi permasalahan pembangunan daerah pada umumnya timbul dari kekuatan yang belum didayagunakan secara optimal, kelemahan yang tidak

diatasi, peluang yang tidak dimanfaatkan dan ancaman yang tidak diantisipasi.

Berdasarkan gambaran umum pelayanan Kecamatan Rakumpit yang telah disampaikan pada bab-bab sebelumnya, paparan permasalahan Eksternal akan dibagi menurut kondisi geografis, sosial kemasyarakatan, pelayanan umum dan ekonomi.

A. Aspek Geografis

Kecamatan Rakumpit dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 01 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kota Palangka Raya (Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2009 Nomor 01);

Setelah dibentuknya Undang-Undang (UU) Nomor 22 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, merupakan tonggak baru menawarkan perubahan fungsi utama pemerintahan daerah yang semula sebagai promotor pembangunan menjadi pelayan masyarakat. Hasil tersebut sejalan dengan visi Kota Palangka Raya, yaitu: "Terwujudnya Kota Palangka Raya menjadi Kota yang Maju, Rukun dan Sejahtera untuk Semua". Dalam UU No. 5 Tahun 1974 yang dimaksud Kecamatan adalah wilayah pemerintahan sedangkan menurut pasal 1 huruf (m) UU No. 22 Tahun 1999 Kecamatan merupakan wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah kabupaten dan kota. Dengan demikian

Kecamatan bukanlah lagi wilayah administrasi pemerintahan, dan Camat bukan lagi kepala wilayah yang memiliki kewenangan sebagai penguasa daerah tetapi Kecamatan hanyalah merupakan wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah, artinya kedudukan Camat di Kecamatan tidak berbeda jauh dengan perangkat daerah lainnya yang ada di Kecamatan.

Sejalan dengan terjadinya gerakan reformasi, mendorong terjadinya perubahan yang nyata dalam konfigurasi politik nasional, termasuk perubahan peraturan perundang-undangan pemerintahan daerah. Kebijakan otonomi daerah melalui UU No. 32 Tahun 2004 yang memberikan otonomi daerah yang sangat luas kepada daerah, khususnya kabupaten dan kota di mana semakin tingginya tuntutan masyarakat akan pelayanan sehingga Pemerintah Kota Palangka Raya memandang perlu untuk mengeluarkan Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 32 Tahun 2002 tentang Pembentukan, Pemecahan dan Penggabungan Kecamatan dan Kelurahan.

Oleh karenanya pada tanggal 28 Pebruari 2003 terbentuklah secara resmi Kecamatan Rakumpit dengan ibukota “Mungku Baru” yang meliputi wilayah Kelurahan, antara lain: (a) Kelurahan Mungku Baru, (b) Kelurahan Bukit Sua, (c) Kelurahan Petuk Barunai, (d) Kelurahan Panjehang, (e) Kelurahan Gaung Baru, (f) Kelurahan Pager dan (g) Kelurahan Petuk Bukit.

Kecamatan Rakumpit merupakan salah satu dari lima kecamatan yang ada di kota Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah, terletak di bagian utara kota Palangka Raya yang merupakan pecahan dari Kecamatan Bukit Batu dan merupakan sebuah kecamatan yang masih terisolir, luas wilayah kecamatan Rakumpit 2.678,51 Km² atau $\pm 40\%$ dari luas wilayah Kota Palangka Raya, sebagian besar kondisi wilayahnya masih dikelilingi hutan rimba dan dari tujuh kelurahan ada 5 (lima) kelurahan terletak di sepanjang aliran sungai Rungan yang merupakan anak dari sungai Kahayan.

Adapun jarak tempuh dari Kota Palangka Raya ke ibukota Kecamatan Rakumpit adalah lebih kurang 155 km dan bisa ditempuh melalui jalan darat adalah lebih kurang 96 km. Selebihnya harus ditempuh melalui sungai dengan menggunakan perahu bermesin yang disebut kelotok. Oleh sebab itu dari 7 kelurahan di wilayah kecamatan Rakumpit yang bisa dijangkau melalui jalan darat hanya ada 2 kelurahan, yaitu Kelurahan Petuk Bukit dan Kelurahan Pager. Sedangkan 5 kelurahan lainnya harus ditempuh melalui sungai dengan menggunakan alat transportasi kelotok dan dengan biaya yang sangat mahal (biaya carter). Di samping itu juga bila musim kemarau tiba sungai menjadi kering sehingga cukup sulit dilewati oleh kelotok.

Adapun batas-batas wilayah Kecamatan Rakumpit adalah sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Berbatasan dengan Kabupten Gunung Mas
- Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Kecamatan Bukit Batu
- Sebelah Barat : Berbatasan dengan Kabupten Katingan
- Sebelah Timur : Berbatasan dengan Kabupten Pulang Pisau

B. Aspek Sosial Kemasyarakatan

Penduduk Kecamatan Rakumpit sebagai subyek dan obyek paling berharga dalam pembangunan daerah berjumlah 3.252 jiwa.

Dengan semakin banyaknya penduduk pendatang, sikap mental dan tingkat kepedulian warga masyarakat atas lingkungannya perlu ditingkatkan melalui kegiatan kerja bakti dan kegiatan gotong royong lainnya.

Untuk mengantisipasi dampak sosial akibat remaja putus sekolah atau angkatan kerja yang belum mendapatkan pekerjaan, perlu adanya pembinaan/pelatihan ketrampilan.

C. Aspek Pelayanan Umum

Permasalahan Kecamatan Rakumpit ditinjau dari aspek pelayanan umum di antaranya adalah :

a. **Kinerja Pelayanan SOPD Kecamatan Rakumpit**

Dari sisi personil, profesionalitas dan integritas SDM aparatur pemerintah masih perlu ditingkatkan. Ditambah dengan rendahnya kualitas database pemerintahan dari sisi pemutakhiran data dan akses publik serta sarana dan prasarana pemerintah masih terbatas.

b. **Kinerja Pelayanan Pendidikan**

Dari sisi pelayanan pendidikan relatif terbatasnya sarana dan prasarana pendidikan yang memadai, jumlah guru yang sangat kurang serta terbatasnya guru bidang tertentu.

c. **Kinerja Pelayanan Kesehatan**

Untuk pelayanan kesehatan, masih banyaknya pemukiman terpencil dan terpencar, sementara tenaga medis terkonsentrasi di pusat kota.

d. **Kinerja dan Potensi Pengembangan Sarana dan Prasarana Transportasi**

Dari sisi ketersediaan infrastruktur, Kecamatan Rakumpit secara umum belum memiliki jaringan transportasi yang cukup baik untuk jalur darat. Selain itu Kecamatan Rakumpit juga belum memiliki jaringan telekomunikasi yang terdistribusi secara merata sedangkan jaringan listrik sudah beroperasi dengan baik di semua Kelurahan sejak awal tahun 2018.

e. Ketersediaan Perumahan dan Sarana Prasarana

Dasar Pemukiman

Ketersediaan perumahan sudah dapat mengimbangi pertumbuhan penduduk. Dari sisi prasarana dan sarana dasar pemukiman, pelayanan air bersih melalui PDAM Kota Palangka Raya belum menjangkau wilayah Kecamatan Rakumpit, sehingga sebagian besar penduduk masih menggunakan sumur bor selain air sungai untuk keperluan hidup sehari-hari.

3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil

Kepala Daerah Terpilih

3.2.1 Visi

“Terwujudnya Kota Palangka Raya menjadi Kota yang Maju, Rukun dan Sejahtera untuk Semua”.

3.2.2 Misi

Misi 1 : Mewujudkan Kemajuan Kota Palangka Raya *Smart Environment* (Lingkungan Cerdas) meliputi; pembangunan Infrastruktur, Teknologi Informasi, Pengelolaan Air, lahan, pengelolaan limbah, manajemen bangunan dan tata ruang, transportasi.

Misi 2 : Mewujudkan Kerukunan seluruh Elemen Masyarakat *Smart Society* (Masyarakat Cerdas) meliputi ; Pengembangan kesehatan, pendidikan, kepemudaan, layanan publik, kerukunan dan keamanan.

Misi 3 : Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat Kota dan Masyarakat Daerah Pinggiran *Smart Economy* (Ekonomi Cerdas) meliputi;

Pengembangan industri, usaha kecil dan menengah, pariwisata dan perbankan.

3.2.3 Program Unggulan

PERTAMA → Pembangunan Insfrastruktur :

- a. Perbaiki kualitas jalan-jalan lingkungan, dalam kota, antar kecamatan dan luar kota;
- b. Perbaiki Drainase pemukiman padat penduduk dan wilayah lainnya;
- c. Peningkatan kualitas air minum;
- d. Peningkatan pembangunan gedung olah seni, sehingga dapat difungsikan sebagai pagelaran seni dan budaya semua komunitas;
- e. Melanjutkan pembangunan perkantoran di lingkaran dalam;
- f. Peningkatan pembangunan fasilitas umum lainnya.

KEDUA → Pertanian Tanaman Pangan, Lingkungan Hidup dan Persampahan :

- a. Peningkatan pemanfaatan lahan budidaya pertanian dan perkebunan;
- b. Keanekaragaman hayati di Kecamatan Sabangau dan Rakumpit;
- c. Peningkatan Pengelolaan Sampah dan Limbah.

KETIGA → Tata Ruang dan Transportasi :

- a. Perbaiki manajemen Tata Ruang Kota Palangka Raya;
- b. Pengelolaan Transportasi angkutan kota ke Objek-objek Wisata;
- c. Penataan Kota dan Pemukiman yang tertata di Kecamatan Pahandut dan Kecamatan Jekan Raya.

KEEMPAT → Kesehatan, Pendidikan, Kepemudaan, Layanan Publik dan Komunikasi :

- a. Peningkatan kualitas kesehatan masyarakat;
- b. Perbaiki kualitas pendidikan di Tingkat SD, SMP;
- c. Peningkatan peran pemuda;
- d. Perbaiki kuantitas dan kualitas layanan publik;
- e. Peningkatan Keamanan kota hingga ke pelosok kota;

f. Pemanfaatan Wifi gratis di titik-titik strategis.

KELIMA → Sosial Budaya :

- a. Peningkatan kerukunan dan kebersamaan masyarakat;
- b. Menjaga kelestarian budaya dan kearifan lokal;
- c. Terwadahnya seluruh kelompok komunitas untuk berekspresi di gedung olah seni.

KEENAM → Reformasi Birokrasi :

- a. Rekrutmen dan penempatan Aparatur;
- b. Pelayanan yang cepat, ramah dan mudah bagi masyarakat;
- c. Program One Agency dan One Inovation per tahun;
- d. Mendukung dan mendorong inovasi dan profesionalisme aparatur Pemerintah Kota;
- e. Meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas kinerja aparatur Pemerintah Kota.

KETUJUH → Ekonomi Kota :

- a. Peningkatan jumlah industri di kawasan Temanggung Tilung;
- b. Peningkatan jumlah usaha kecil dan menengah;
- c. Peningkatan kualitas fisik pasar;
- d. Berkembangnya sarana belanja yang nyaman;
- e. Meningkatkan kunjungan pariwisata;
- f. Peningkatan Aktivitas Perbankan;
- g. Pengembangan ekonomi kreatif dan ekonomi digital.

KEDELAPAN → Pendapatan Daerah :

- a. Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD);
- b. Peningkatan Investasi;
- c. Partisipasi angkatan kerja;
- d. Meningkatnya daya beli masyarakat;
- e. Pengembangan ekonomi lokal;
- f. Kesejahteraan Aparatur Sipil Negara dan Tenaga Kontrak.

KESEMBILAN → Sumber Daya Alam :

- a. Peningkatan destinasi wisata kecamatan Sabangau;
- b. Kecamatan Bukit Batu sebagai sentra Palawija dan Pariwisata;
- c. Pengelolaan konservasi dan rehabilitasi sumber daya alam.

3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra

Faktor-faktor yang mempengaruhi pelayanan pada Kantor Kecamatan Rakumpit ditinjau dari sasaran jangka menengah Renstra Kementerian dan Provinsi antara lain :

1. Pegawai belum semuanya mendapatkan diklat teknis dan fungsional maupun

Diklatpim sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku;

2. Sarana dan prasarana kantor belum terpenuhi secara keseluruhan;
3. Belum optimalnya partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan, pembangunan serta pelaksanaan kegiatan sosial;
4. Belum optimalnya koordinasi antar instansi/UPT/UPTD yang diharapkan dapat memperlancar dan mempertajam analisa perencanaan pembangunan.

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Kecamatan Rakumpit termasuk dalam kawasan pengembangan Kota Palangka Raya sesuai dengan RPJMD Tahun 2018-2023 Kota Palangka Raya dan Rencana Tata ruang Wilayah Kota Palangka Raya, diarahkan untuk kawasan Sub pusat pelayanan yang berfungsi sebagai kawasan dengan kegiatan pertanian non ekstensif, perkebunan, perikanan air tawar, dan kegiatan pertambangan dan kehutanan (social forestry) serta preservasi lingkungan dan adaptive planning;

Kondisi saat ini Kecamatan Rakumpit dari luas total sekitar 2.678,51 km², dapat dikatakan bahwa Kecamatan Rakumpit kedepan akan menata dan mengoptimalkan setiap lahan yang ada untuk dapat dipergunakan sebaik-baiknya untuk penghijauan, konservasi lingkungan hidup.

3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis

Analisis isu-isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana strategis SKPD untuk melengkapi tahapan-tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis meningkatkan akseptabilitas prioritas pembangunan, dapat dioperasionalkan dan secara moral dan etika birokratis dapat dipertanggung jawabkan.

Dengan mengintegrasikan kajian permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan SOPD secara umum dan memperhatikan tantangan dan permasalahan menurut arahan

RPJMD Kota Palangka Raya disusun issue-issue strategis Kecamatan Rakumpit.

Isu-isu Strategis Kecamatan Rakumpit Tahun 2018 - 2023

NO	ISSUE STRATEGIS	PERMASALAHAN STRATEGIS
1	Pelayanan Publik	<ul style="list-style-type: none"> • Kualitas pelayanan publik baik dalam pelayanan dasar masyarakat maupun pelayanan perijinan perlu ditingkatkan • Integritas dan profesionalitas aparatur pemerintah daerah perlu ditingkatkan • Daya dukung infrastruktur pelayanan publik perlu ditingkatkan
2	Kelembagaan Masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> • Rendahnya kapasitas dan peran lembaga kemasyarakatan (partisipasi publik) dalam pembangunan
3	Sektor Ekonomi Unggulan	<ul style="list-style-type: none"> • Kurang terfasilitasinya sektor ekonomi lokal unggulan dalam hal permodalan, pelatihan SDM dan pemasaran produk • Kurangnya keterlibatan stakeholder dan pelaku ekonomi terkait
4	Kualitas lingkungan hidup	<ul style="list-style-type: none"> • Banyak Pertambangan Tanpa Izin di wilayah Kecamatan Rakumpit yang dapat menyebabkan pencemaran lingkungan • Kurangnya TPS di permukiman penduduk